



TERORISME DI INDONESIA



Oleh:
AM Hendropriyono
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

Keadaan Internasional

Dari segi jumlah penduduk, yang sekitar 295 jutaan Amerika Serikat (USA) – bukanlah sebuah negara besar. RRC dan India, jelas jauh di atas itu tingkat kepadatannya. Dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk dunia yang 6,5 milyar, tentu USA tidak berarti banyak. Namun apabila dilihat dari sisi ekonomi, posisi USA menjadi sangat kuat (*powerful*). Apalagi setelah kecenderungan pasar global dengan kapitalisme sebagai rohnya menjadi ciri utama (*mainstream*) ekonomi modern dewasa ini, Amerika Serikat kian menonjol perannya. Tiadanya saingan utama USA dalam pasar bebas ini, di satu pihak, telah memberikan banyak keuntungan kepada negara adidaya tersebut, namun, di pihak lain, kondisi ini semakin memiskinkan sebagian besar negara dan masyarakat di muka bumi ini. Ketimpangan dan ketidakadilan antarbangsa dewasa ini, telah ditafsirkan sebagai konsekuensi logis dari sistem ekonomi dunia yang bersandar pada pasar bebas tersebut.

Celakanya, fenomena ketimpangan dan ketidakadilan ini merambat pula ke wilayah yang lebih kecil, baik di lingkungan kawasan (regional) maupun di masing-masing negara. Tidak sedikit terjadi bahwa konsentrasi kekayaan justru dinikmati oleh kelompok yang secara sosiologis merupakan minoritas di wilayah yang bersangkutan. Sebut saja minoritas Cina di negara-negara Asia Tenggara, Kroasia di negara-negara Balkan, kaum kulit putih di negara-negara Amerika Latin dan Afrika Selatan, keturunan India di Afrika Timur, Libanon di Afrika Barat, Yahudi di Rusia dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, kenyataan yang demikian tidak dapat difahami semata-mata dari sisi budaya dan ekonomi, bahwa pendatang itu rajin dan ulet serta memiliki modal ekonomi lebih kuat ketimbang penduduk asli. Sebagaimana kerap terjadi, stempel sifat “pribumi” itu malas, dan karenanya tertinggal, miskin dan bodoh, tidak bisa begitu saja diterima sebagai suatu kebenaran. Artinya, dalam situasi yang demikian, sentimen terhadap pendatang lebih bersifat *psycho politics* ketimbang *rational economics*. Pada gilirannya, fenomena kesenjangan ini akan memperkuat kecemburuan sosial dari mayoritas yang kebetulan “pribumi”, tertinggal, miskin, dan bodoh, terhadap “pendatang” yang maju, kaya, dan merasa lebih tahu.

Dalam perkembangan terakhir, pola hubungan yang negatif antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin terlihat semakin mencolok dalam hubungan antarbangsa. Kebencian masyarakat Islam di Timur Tengah terhadap Amerika Serikat, bukan hanya disebabkan oleh keterlibatan politik luar negerinya yang langsung dan terlalu jauh dalam konflik Arab-Israel, namun juga banyak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan rasional ekonomi dari negara adikuasa tersebut. Konflik Irak-Kuwait dan juga invasi Amerika Serikat ke Irak serta strategi pre-emptifnya yang menghalalkan segala cara (*machiavelian*) dalam perang melawan teror, telah menambah bergelornya semangat anti-Amerika di kalangan mayoritas penduduk dunia.

Latar belakang kepentingan ekonomi-politik USA seperti itu, telah memperkuat munculnya gejala sektarianisme-Islam di negara-negara yang



mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ditambah lagi oleh adanya sikap USA yang seringkali menggunakan standar ganda terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia, disadari atau tidak, telah menjadi daya dorong bagi lahirnya solidaritas kolektif sesama bangsa dalam menghadapi musuh bersama. Pada tingkatan yang demikian, dapat difahami jika masyarakat dan negara yang dianggap sebagai “berbeda” dengan USA akan menggunakan segala macam cara pula untuk mengimbanginya. Pada puncaknya, konflik yang semula bersifat pertarungan peradaban (*clash of civilization*), belakangan akan berubah menjadi perang Dunia Islam, di satu pihak, melawan, Dunia Barat, di pihak lain. Sadar bahwa lewat cara-cara konvensional negara yang disebut pertama secara *conventional* tidak mungkin mampu menyaingi USA, maka digunakan bentuk perlawanan yang *incoventional*, termasuk di dalamnya pengembangan kejahatan transnasional sampai terorisme global.

Gerakan sempalan yang semula kecil dan kurang berpengaruh, belakangan berubah menjadi radikal dan mendapat dukungan yang kian masif dari publik, karena ada gejala “musuh bersama” itu. Gerakan Ichwanul Muslimin di Mesir, sekedar menyebut salah satu contohnya, yang dapat dipandang sebagai gerakan radikal yang semula hampir punah, belakangan muncul kembali menemukan dasar pijakannya serta memperoleh dukungan makin luas karena menghadapi lawan bersama yang namanya USA itu.



Sektarianisme-Islam yang berkembang ini dalam tataran politik bersifat teokratis, sehingga baik langsung maupun tidak langsung telah mengundang ide lahirnya separatisme di dalam masyarakat sekuler di negara-negara nasional. Di samping itu pada anarkisme di kalangan masyarakat internasional mulai berjangkit, seperti yang terjadi di Perancis November 2005 lalu dan Australia pada Desember 2005, yang bersumber pada dua polar sosial yang saling berhadapan, meski sebenarnya masalah tersebut lebih berakar pada persoalan yang bersifat rasialistis.

Kecemburuan sosial yang bersifat horisontal menggiring dunia kepada polarisasi kekuatan-kekuatan ekonomi regional yang menantang USA (Amerika Serikat). Mereka adalah negara-negara yang baru bangkit untuk menjadi raksasa, yaitu China dan India. Pertumbuhan ekonomi tahunan China 8% sedangkan India 7%. Jika koefisiennya konstan maka GDP China akan menjadi lima kali lebih besar daripada Jepang pada 2040. India dan China bersama-sama akan terus bergerak maju, dalam rangka merebut kepemimpinan ekonomi global.

Strategi Amerika dalam mengantisipasi perkembangan keadaan adalah menggalang persatuan dengan Uni Eropa. Dalam membela

kepentingan korporasi multinasional atau *Multi National Corporation* (MNC) mereka, negara industri ini mengembangkan berbagai macam konferensi internasional, antara lain yang mutakhir adalah konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI WTO yang diselenggarakan di Hongkong tanggal 13-18 Desember 2005 yang baru lalu. Kepentingan bisnis korporasi multinasional cukup kental memengaruhi jalannya perundingan, yang disebut Agenda Pembangunan Doha di antara 128 negara di dunia. Konferensi itu membahas masalah atau *issue* perdagangan dunia yang harus dipecahkan sampai dengan Desember 2006. Negara-negara berkembang harus memperjuangkan nasibnya, karena: pertama, bahwa pihak yang paling diuntungkan oleh subsidi yang sangat tinggi di negara-negara maju dewasa ini adalah Pertanian-Korporasi alias petani berdasar dinegara mereka, kedua, posisi bisnis MNC semakin menggurita dengan terbukanya akses pasar di negara-negara berkembang, sehingga mereka dapat menguasai imperium ekonomi baru dunia, dan ketiga, konsep bantuan pangan kepada negara-negara berkembang ternyata juga akhirnya dinikmati MNC dari negara mereka sendiri.

Empat perusahaan MNC yang mendominasi komoditas 83% *beef packers*, 71% perdagangan kedelai, dan 63% perdagangan terigu dunia semuanya berada di Amerika Serikat dan Eropa. Konsentrasi sedemikian membuat mereka sangat leluasa dalam membentuk kartel, baik kartel harga maupun kartel wilayah. Apalagi, Amerika Serikat merupakan negara adikuasa dalam berbagai aspek, di antaranya dalam penguasaan teknologi informasi dan media massa. Hal ini membuat Amerika dapat mengendalikan dan mendominasi opini dunia.

Menurut Mahathir Mohammad ketika menerima saya dua bulan menjelang pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 2003, USA dan negara-negara industri maju dulu pernah diramalkan Bung Karno akan lahir sebagai *kapitalis* bentuk baru yang dinamakannya sebagai kaum *neo-kapitalis* yang memunyai aliran *neo-imperialisme*. Kalau kapitalisme masa lampau beranak kandung imperialisme, maka neo-kapitalisme masa kini telah beranak kandung neo-imperialisme.

Namun berbeda dengan imperialisme masa lampau, *neo-imperialists* menggunakan siasat baru dengan cara mengajak berunding negara-negara berkembang dalam WTO. Walaupun dalam kesimpulan kesepakatan konperensi tersebut terdapat kemajuan bagi negara-negara berkembang, namun Indonesia tetap masih harus berjuang keras untuk membela kepentingannya, dengan menggalang persatuan bangsa-bangsa senasib dalam menyelesaikan perundingan lanjutan dalam semua isu.

Apa yang telah dicapai yaitu kesepakatan kaum neo-kapitalis untuk menghapuskan subsidi ekspornya pada akhir tahun 2013, yang memberi kesempatan kepada negara-negara berkembang menyusun *list* produk-produk khusus dan penggunaan mekanisme SSM (*Special Safeguard Mechanism*), tetap saja dirasakan oleh negara-negara berkembang, masih jauh dari harapan untuk tercapainya keadilan dalam pembagian kue dunia.

Jika Agenda Pembangunan Doha, yaitu konperensi-konperensi WTO yang merupakan tindak lanjut pertemuan di Qatar dulu, akhirnya kelak tidak memberikan hasil yang signifikan bagi negara-negara berkembang, maka gerakan komponen-komponen internasional yang menginginkan masalah pertanian keluar dari WTO, akan bermuara kepada bentuk ekstrimnya yang menginginkan pembubaran WTO.

Dalam kondisi demikian, imperium ekonomi diperkirakan akan lebih cepat beralih ke tangan sang raksasa baru China dan India, yang gerak majunya hanya akan dapat dihentikan jika kemampuan pasokan energi dunia dapat dikendalikan. Obsesi penguasaan terhadap sumber-sumber minyak di Timur Tengah oleh Amerika Serikat dapat membuat layu kedua raksasa itu sekaligus, sebelum mereka berkembang kuat dalam kompetisi horisontal dunia.

China berambisi mengejar dan mendahului Amerika Serikat dalam kurun waktu tidak lebih dari setengah abad mendatang, suatu cita-cita yang menurut Lee Kuan Yew sangat realistik. Kemajuan China dan India itu akan dapat menarik gerbong-gerbong ekonomi negara Singapura, Thailand, Malaysia, dan Australia sehingga roda-rodanya

menggelinding di belakang kekuatan-kekuatan baru ekonomi regional itu. Sebaliknya, negara-negara Asia Tenggara yang gerbongnya belum memunyai roda atau rodanya masih macet, justru akan jatuh terguling dan terseret berantakan, karena tetap akan menjadi konsumen dalam pasar ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Kegagalan Amerika Serikat di Timur Tengah dalam menguasai sumber-sumber energi akan menjadi peluang bagi kedua raksasa baru, China dan India, untuk melanjutkan geliat kekuatan ekonominya. Lebih dari itu, kecenderungan yang demikian sekaligus akan memperluas dan memperkuat sentimen sektarianisme-Islam.

Medan perang-psikologi dalam era kita ini akan bergeser ke Asia yang Asia Tenggara merupakan tempat pertempuran yang paling dahsyat, antara kekuatan ekonomi Amerika dan kekuatan ekonomi China serta India, antara front anti-teror dunia dan terorisme internasional, serta antara sekulerisme negara-negara kebangsaan dan konsep sektarianisme domestik.

Non-Governmental Organizations (NGO-NGO) tertentu yang bekerja atas nama demokratisasi, keterbukaan, penegakkan HAM, dan lingkungan hidup dunia, telah dimanfaatkan oleh kaum neo-kapitalis untuk menggembosi saingan-saingannya dalam membangun imperium ekonomi. Selanjutnya, mereka pun akan ikut serta meramalkan kedahsyatan benturan-benturan antarkekuatan ekonomi dunia tersebut.

Bertolak dari situasi aktual seperti di atas dan prediksi keadaan dunia yang demikian, maka pelaksanaan dari berbagai jargon internasional dalam mengatasi bermacam jenis *transnational crimes*, terutama *money laundering* dan terorisme, akan berjalan dengan sangat lambat.

Keadaan Nasional

Peran negara bangsa (*nation state*) Indonesia yang sejak awalnya diwarnai oleh berbagai keragaman dalam menghadapi perkembangan keadaan dunia dan tantangan regional, semakin lama semakin sentral dan sekaligus menemui problema yang semakin kompleks. Sebagai sebuah "Masyarakat yang Terbayangkan" (*Imagined*

Community), negara-bangsa ini sekarang sungguh-sungguh menghadapi ujian yang teramat berat. Selama kurun waktu empat tahun ke depan akan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman, gangguan ataupun hambatan dari gerakan bawah-tanah (*klandestin*) yang dinamakan Al-Jamaah Al-Islamiyah (AJAI).

Sekedar catatan, gerakan tersebut terbentuk pada awal tahun 1993 setelah terjadinya perpecahan antara Ajengan Masduki pimpinan Negara Islam Indonesia (NII) dan dua orang Arab WNI Abdullah Sungkar (AS) dan Abu Bakar Baasyir (ABB), pimpinan pesantren Al Mukmin Ngruki, dalam pelarian mereka sejak 1985 di Malaysia. Kemenangan pengaruh dwi-tunggal Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir atas pimpinan NII, menyebabkan basis latihan militer Towrkham di Afghanistan yang semula diselenggarakan oleh kedua belah pihak, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh AJAI. Keleluasan AJAI dalam mengembangkan strateginya setelah lepas dari NII terlihat dari pembukaan kem latihan militer Hudaybiyah oleh AJAI di Mindanao Filipina Selatan pada akhir 1994, untuk melatih para pejuang Islam suku Moro melawan pemerintahnya. AJAI juga dengan cepat melakukan konsolidasi dan kaderisasi internal, antara lain dengan menempatkan Nurdin M. Top, seorang mahasiswa, dan Azahari (almatuhum), seorang dosen Universitas Teknologi Malaysia, ke dalam organisasinya pada 1997. Nurdin M. Top adalah seorang pengendali lapangan yang berbakat dan Azahari adalah seorang ahli teknik bahan peledak yang piawai.

Dalam operasinya, mereka berdua terlibat dalam serangkaian pengeboman yang merusak tanah air dan mengorbankan banyak bangsa Indonesia pribumi maupun WNI keturunan asing yang muslim dan nonmuslim, di samping banyak sekali juga WNA dan turis, sehingga membuat kerugian sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia di bidang sosial-ekonomi, terutama masyarakat Bali yang menjadi tempat sasaran pengeboman sampai dua kali.

Yang terungkap dan telah terbukti antara lain pada 12 Oktober 2002, alm Azahari terlibat dalam pengeboman di Bali yang pertama. Kemudian



bersama-sama dengan Nurdin M. Top yang sampai sekarang masih buron terlibat dalam pengeboman hotel Marriott di Jakarta pada 5 Agustus 2003, Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004, dan di Bali untuk kedua kalinya pada 1 Oktober 2005.

Sarang atau Markas Besar Al-Jamaah Al-Islamiyah (AJAI) - yang dalam bahasa Arab disebut Qidah Aminah - sejak 1999 disepakati berdisklokasi di Indonesia. Alasan Indonesia dipilih sebagai sarang antara lain :

1. Anggota-anggotanya yang terbanyak tinggal di Indonesia.
2. Kontrol yang lemah dari pemerintah terhadap masyarakat, yang sedang dalam proses demokratisasi politik.
3. Administrasi kependudukan yang kronis dan semrawut.
4. Disiplin sosial yang rendah dari masyarakat yang sedang menikmati eforia keterbukaan.
5. Potensial sebagai wilayah garap utama AJAI, sebab secara historis merupakan wilayah garapan Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamirkan oleh Kartosoewiryo pada 7 Agustus 1949.

Berbagai basis AJAI yang tersebar di seluruh Indonesia terutama di Jawa kebanyakan dilindungi oleh penduduk tertentu setempat, yang telah direkrut sebelumnya sebagai pendukung-pendukung mereka.

Di wilayah negara nasional bangsa Indonesia sekarang ini, Kepala atau Amir AJAI beserta stafnya (Qiyadah Markaziy) memimpin dengan leluasa

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, administrasi, dan kontrol terhadap sayap *klandestin* (bawah tanah) yang dilakukan oleh Lasykar Unit Khos. Demikian pula, kegiatan membangun generasi baru atau barisan lapis kedua dilakukan di Indonesia, setelah fungsi tersebut tidak lagi dapat diemban oleh basis militer Jabal Kuba Mindanao Philipina Selatan (Dislokasi mutakhir setelah dirazia terus oleh tentara Filipina).

Kelemahan administrasi nasional semenjak bergulirnya reformasi 1998 terlihat jelas dari kebijakan pembiaran terhadap pelanggaran undang-undang kewarganegaraan RI oleh para pelarian NII dan para penganut Daulah-Islam versi alm Abdullah Sungkar yang kemudian digantikan oleh Abu Bakar Baasyir.

Mereka telah menyelenggarakan dan mengikuti latihan-latihan militer di Pakistan dan Afghanistan, serta ikut bertempur untuk negara Afghanistan yang bukan bangsa dan negaranya sendiri, tanpa izin atau di bawah koordinasi resmi pemerintah RI: suatu kegiatan yang jelas merupakan pelanggaran yang diancam dengan pencabutan kewarganegaraan RI. Mereka terpengaruh oleh penggalangan Abubakar Baasyir dan alm Abdullah Sungkar, yang sejak 1982 ditengarai melakukan gerakan subversif, melalui dakwah-dakwah yang katanya bertujuan mengkritik pemerintah, tetapi pada kenyataannya bersifat menghasut. Dakwah-dakwah tersebut mereka lakukan secara terang-terangan, tidak seperti pelaksanaan teror yang dilakukan secara tertutup atau *klandestin* (bawah tanah).

Kebijakan pembiaran (*by omission policy*) terhadap penggalangan massa melalui dakwah-dakwah seperti itu yang berlangsung terus sejak reformasi sampai sekarang, baik langsung maupun tidak langsung telah menggalakkan *animo beligenti* atau nafsu berperang kepada para pendengarnya, sehingga mengakibatkan merebaknya aksi-aksi anarki berupa serang-menyerang antarmasyarakat bangsa Indonesia sendiri yang berbeda agama, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso: perusakan terhadap tempat-tempat ibadah, serangan dan perusakan aset Ahmadiyah, penyerbuan tempat-tempat hiburan, penghancuran komoditas minuman

keras milik rakyat kecil, dan lain lain, dengan dalih pelanggaran terhadap aturan agama, maksiat, pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku.

Namun karena aksi-aksi tersebut dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara yang berwenang, maka sifatnya menjadi tidak terukur. Akibat lebih lanjutnya adalah citra martabat luhur budaya bangsa kita yang terkenal karena usaha susah payah dari para pendahulu, menjadi sirna dalam waktu yang sangat singkat.

Pada tahun 1978, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir termontor melakukan dakwah-dakwah secara intensif, berkhotbah di berbagai masjid, berceramah di berbagai tempat, menebarkan melalui radio pemancar swasta kepunyaan mereka yang bernama RADIS (Radio Dakwah Islamiyah Nusantara) suatu pemahaman yang menuai semangat jihad dan mati syahid.

Dalam salah satu dakwahnya Abu Bakar Baasyir menyatakan bahwa semua undang-undang yang dibuat parlemen merupakan hasil perbuatan syirik, karena menyaingi Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Pemerintahan apa pun yang tidak menggunakan Al-Qur'an dan Hadist secara kaffah adalah pemerintahan sekuler yang *thogut* dan wajib diperangi.

Apa yang dipropagandakan oleh Abu Bakar Baasyir (ABB) memunyai konteks yang lebih luas daripada sekedar melanjutkan usaha Darul Islam (DI) untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII) di Indonesia. Daulah Islam dalam versi Abu Bakar Baasyir adalah kewajiban menerapkan syari'ah oleh pemerintah negara mana pun, tidak terbatas pada negara nasional RI. Negara juga tidak boleh diperintah oleh wanita. Jika ia terpilih atau mendapat amanah untuk itu, maka ia wajib menolaknya. ABB lupa bahwa masalah jender dalam budaya bangsa kita, sudah tidak ada. Sejarah membuktikan bahwa nama besar bangsa kita pernah dicapai oleh kepemimpinan perempuan Indonesia, ketika Panglima Islam Aceh, Malahayati menyerbu Portugis, Ratu kerajaan Islam Jepara Nyai Kalinyamat menyerang Malaka, Cut Nyak Dien memberontak terhadap Belanda, dan lain-lain.

Karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan gerakan Abu Bakar Baasyir lebih bersifat ideologis daripada tujuan politik. Meskipun ia menghindari kata-kata anti-Pancasila, tetapi serangkaian dakwahnya sejak 1974 bernuansa menghasut umat agar mengingkari Pancasila, padahal ia tahu bahwa ideologi Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa kita, ketika membentuk negara kebangsaan Indonesia. Menurutnya Pancasila dan undang-undang adalah buatan manusia dan parlemen, buatan orang-orang syirik yang berdosa besar, karena menyamai Tuhan mengatur kehidupan umat manusia.

Ia menyalahkan setiap jalan tengah yang diambil demi persatuan bangsa dan lebih mengajarkan pemaksaan ideologi, melalui jihad dan syahid dengan dalih demi Al-Qur'an dan Hadist. Karena kelihaiannya dalam berargumentasi dan menggunakan dalil-dalil agama dalam mengemas dakwahnya, ia berhasil lolos dari pengamatan pemerintah Malaysia sehingga selama 15 tahun menikmati pemiarian dalam membangun dan memperluas jaring (*network*)-nya di Asia Tenggara. Sampai akhirnya pada 2001 pemerintah jiran itu sadar dan Special Branch Malaysia mulai mengusut serta melakukan pengejaran.

Sementara, negara kebangsaan Indonesia yang sedang berada dalam transisi demokrasi merupakan lahan empuk, yang memberi kesempatan emas bagi Abdulah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir untuk kembali pulang dengan aman pada 1999. Pengejaran Special Branch Malaysia belum berhasil, karena ABB keburu kabur pulang dan ditahan di Indonesia. Namun, ia diadili hanya karena sebagai WNI yang telah melanggar peraturan imigrasi.

Sejak 1978 sampai mereka meninggalkan Indonesia dulu pada 1985, aparat penegak hukum RI telah terkecoh, sehingga mendakwa AS dan Abu Bakar Baasyir melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak relevan dengan sifat subversinya. Demikian pula sekarang dakwahnya tentang dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist dalam kehidupan sosial politik, telah membungkus rapi pemikiran konservatifnya, sehingga menggecoh aparat penegak hukum dan telah membuat sebahagian umat Islam moderat di negara kita ini terpana serta

larut juga dalam sikap pemiarian.

Abu Bakar Baasyir dengan leluasa melakukan penggalangan kekuatan psikologis umat Islam Indonesia, agar menganggap linier dinamika kehidupan manusia di dunia. Dengan cerdik pula Abu Bakar Baasyir membingkai kegiatannya yang provokatif dengan sentimen negatif kita terhadap aksi-aksi pemerintah Amerika. Konservatisme ideologis semacam ini dapat menjerumuskan negara kebangsaan dengan masyarakatnya yang heterogen, ke dalam konflik sosial di dalam negeri yang dapat mengakibatkan perpecahan nasional.

Konsep gerakan yang mereka lakukan di kala negara nasional Indonesia dan Malaysia sedang sibuk berjuang menghadapi neo-kapitalisme saat ini, sama dengan gerakan pengkhianatan DI dulu yang dilakukan di kala bangsa Indonesia sedang sibuk berperang melawan kolonialis Belanda. Tentara Islam Indonesia (TII) telah menghadang pasukan dari divisi Siliwangi TNI-AD yang sedang kembali dari hijrahnya, sehingga terjadi pertempuran di Antralina, Malangbong pada 25 Januari 1949. Markas Besar Tentara Islam Indonesia (TII) dan pusat Negara Islam Indonesia (NII) dulu berada di Jawa Barat, namun pengaruhnya bisa meluas ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. DI/TII di Jawa Barat tersebut mendapat bantuan logistik dari kaum kapitalis Belanda yang memiliki perkebunan-perkebunan di sana dan mendapat dukungan dari penyokong-penyokong negara Pasundan, boneka Belanda di zaman RIS (Republik Indonesia Serikat).

Sebelum itu, pada Februari 1948 di Cisayong Jawa Barat, mereka telah membekukan Partai Masyumi. Kemudian pada 7 Agustus 1949, mereka memproklamkan NII di wilayah negara kebangsaan Republik Indonesia. Terorisme yang dilancarkan DI/TII di Jawa Barat telah membangkitkan amarah massa, sehingga operasi semesta *Pagar Betis* rakyat yang mengepung DI berhasil gemilang menghentikan aksi-aksi mereka lebih lanjut. Perpecahan nasional di kala itu bisa terjadi jika gerakan politik berideologi agama di akar rumput masyarakat kita, tidak dengan tegas dan cepat dibasmi.

Pada dekade 1950-an Daud Beur'ueh yang sakit hati dan bergolak telah dilantik di Aceh sebagai imam DI oleh Kolonel TII Abdul Fattah Wiranangapati atas nama imam besar Kartosoewiryo. Beur'ueh kemudian menyatakan daerah Aceh merupakan bagian dari NII.

Administrasi kabinet RI waktu itu secara tegas menumpas mereka, melalui strategi intelijen dan operasi militer yang brilian dengan dukungan massa rakyat, sehingga para pendukung DI di Aceh dapat kembali kepangkuan ibu pertiwi. Pergolakan di Aceh berlanjut dengan Gerakan separatis Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hassan Tiro. Namun berbeda dengan Daud Beur'ueh, GAM bukan penerus aspirasi DI/NII. GAM beraliran sekuler dan menginginkan kerajaan Islam Aceh yang lepas dari negara kesatuan RI. Itulah sebabnya dengan simpati tersembunyi dari dunia internasional, GAM sulit diatasi melalui cara-cara militer, terlebih-lebih dalam tatanan internal demokrasi liberal sekarang ini. Masyarakat yang tidak mengerti serta merta menyalahkan militer yang frustratif, karena harus berkelahi dari dalam kurungan besi, melawan musuh yang bebas menari-nari. Di lain pihak, militer tidak sadar bahwa posisi dirinya sebagai alat negara, sebenarnya sangat kuat terlindungi di bawah tanggung jawab otoritas sipil.

Setelah rakyat dan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1998 sepakat mendemokratisasikan negara nasional RI, maka sistem administrasi negara berubah menjadi sistem supremasi sipil. Namun ternyata sampai sekarang Departemen Pertahanan dan Departemen Dalam Negeri tidak juga membawahi markas-markas besar alat-alat negara RI yang bersenjata. Langkah reformasi yang setengah hati dengan membiarkan alat-alat negara hanya di bawah kontrol presiden, memperbesar kemungkinan politisasi penguasa negara terhadap TNI dan Polri.

Usaha RI dalam menghadapi GAM terpaksa harus kembali ke panggung politik. Perpanjangan masa kerja internasional dari Aceh Monitoring Mission (AMM), kegagalan untuk memekarkan propinsi Aceh, kemenangan GAM dalam Pilkada, dan penyelenggaraan referendum yang bersifat lokal, akan mengakibatkan kegagalan dipanggung

politik. Jika panggung politik ternyata kelak gagal juga, maka *success story* atau jejak keberhasilan separatisme mereka itu, akan diikuti oleh daerah-daerah potensial bergolak lainnya seperti Papua dan Maluku Selatan. Di lain pihak, jika negara kebangsaan kita gagal dalam menumpas aspirasi NII atau AJAI, maka ketidakpercayaan rakyat di daerah-daerah tersebut juga - bahkan mungkin ditambah Bali - dapat meningkat dengan cepat. Akhirnya, hal ini dapat membawa berjangkitnya sektarianisme domestik laksana mekanisme kartu domino, yang menantang ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sistimatis para pendiri negara telah mufakat menentukan Pancasila sebagai dasar negara proklamasi 17 Agustus 1945 dan kemudian dalam sejarah kehidupannya selalu diperjuangkan agar tetap abadi, bahkan juga oleh kabinet Burhanuddin Harahap yang berasal dari partai Islam Masyumi.

Berbeda dengan DI atau NII yang ingin merebut kedaulatan secara politik dari tangan pemerintah negara kebangsaan yang dinilainya sekuler, AJAI ingin merebut psikologi pemerintah negara kebangsaan yang dinilainya sekuler, sehingga syari'ah Islam fundamentalis versi ABB dapat berdaulah.

Bukan hanya di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Islam terbesar didunia, tetapi di mana-mana, khususnya yang paling mungkin bagi mereka di Asia Tenggara adalah Indonesia, Malaysia dan Mindanao Filipina yang penduduknya sebagian besar muslim, otak para pemimpinnya ingin mereka cuci agar menerapkan syari'ah Islam secara kaffah seperti versi ABB di negara-negara yang di bawah perintahnya.

Dengan strategi AJAI yang tiga dimensi, yaitu mimbar dakwah, politik praktis, dan gerakan klandestin, pengikut ideologi Abu Bakar Baasyir terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengancam eksistensi wawasan kebangsaan kita. Ketahanan negara kebangsaan dalam menghadapi tantangan ideologis seperti ini memerlukan dukungan mobilisasi kekuatan rakyat.

Wawasan Kebangsaan

Sebagai suatu konsep yang dinamis, wawasan kebangsaan merupakan sintesa dari dialektika sosial abad ini. Karenanya, wawasan kebangsaan Indonesia merupakan suatu proses pembinaan hubungan yang harus berlangsung terus-menerus, antara berbagai suku, agama, dan golongan pada berbagai strata dalam masyarakat Indonesia dengan negara kebangsaan RI yang dibangunnya sendiri.

Pada saat persatuan bangsa kini berada dalam ancaman teror, anarkisme, subversi, dan separatisme, hasil kebijakan untuk mempersempit ruang gerak berbagai aspirasi sektarian dan primordialistik dalam masyarakat kita belum juga terlihat. Kepemimpinan nasional di berbagai lapisan sejak awal reformasi justru memperlonggar berkembangnya tuntutan Peraturan Daerah (Perda) yang berasaskan syari'ah. Bahkan seseorang walikota di Sumatera telah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut akidah, sebagai persyaratan warga yang hendak menikah. Padahal, masalah keagamaan sesuai undang-undang adalah masalah pemerintah pusat. Hal yang bertentangan dengan praksis dari dasar filsafat negara kebangsaan ini, layak ditangkal dengan suatu peninjauan eksekutif atau *executive review*, agar tidak meluas ke daerah lain dan aspek lain dalam kebijakan publik.

Tidak efektifnya usaha pembinaan terhadap perkembangan wawasan kebangsaan dalam berbagai kebijakan publik selama ini, telah menyebabkan jauhnya ikatan batin antara generasi penerus kepemimpinan kini dan generasi pendiri bangsa Indonesia. Padahal, dari wawasan itulah bersumber ideologi Pancasila, yang menjadi acuan dari berbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk agama, pertahanan dan keamanan.

Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang rakyat, pemerintah, dan teritorialnya merdeka di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, dalam mengatur, dan mengurus dirinya sendiri. Negara nasional bangsa Indonesia adalah negara yang ideologinya digali dari akar budaya bangsanya sendiri, bebas dari dominasi pengaruh budaya asing



seperti : Belanda, Jepang, China, Arab, atau bangsa lain.

Praktik otonomi daerah selama ini telah memberi peranan komponen-komponen bangsa untuk berjalan sendiri-sendiri, bukan dalam bingkai kebersamaan yang bisa menimbulkan kekuatan sinergis. Akibatnya, kemampuan dalam mempertahankan wawasan kebangsaan kita makin menurun, sehingga tidak menghasilkan kemampuan-kemampuan besar dalam persaingan global ini.

Lepasnya hubungan bathin dengan generasi terdahulu tidak akan berakibat fatal, manakala aktualisasi wawasan kebangsaan itu semakin nyata dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Kenyataan bahwa kualitas kehidupan masyarakat yang semakin mundur, merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan dan negara kebangsaan Indonesia.

Gap antara cita-cita berbangsa serta bernegara kebangsaan dan kenyataan aktual yang demikian

jauh, merupakan masalah serius yang harus ditangani kepemimpinan bangsa dari generasi ke generasi.

Pada dasawarsa-dasawarsa awal berdirinya negara kebangsaan Indonesia, kita berada dalam suasana perang, penghianatan-penghianatan ideologis, dan berbagai pemberontakan dalam negeri. Karenanya, kita dihadapkan pada pilihan tatanan negara kebangsaan yang mengandalkan kharisma Pemimpin Besar Revolusi. Di bawah Bung Karno, bangsa Indonesia bisa bergerak dengan cepat dalam jumlah penduduknya yang demikian besar, menyelesaikan masalah-masalah bangsa termasuk merebut kembali Irian Barat dan bahkan mampu memimpin negara-negara *the new emerging forces* melawan ketidakadilan dunia.

Tatanan dengan fungsi kontrol Pak Harto yang kuat terhadap masyarakat berlanjut ketika Orde Baru melakukan pembersihan terhadap ideologi komunis di Indonesia, sehingga pembangunan Indonesia dapat dipercepat sampai mampu ber-swasembada pangan. Bahkan teramalkan sebagai macan ekonomi Asia yang akan menggeliat pada 2010.

Ketika reformasi bergulir dan tatanan lama yang bersifat otokrasi hancur berantakan, Megawati dan para penyelenggara negara tampil dengan memilih demokrasi liberal sebagai tatanan internal RI.

Demokratisasi negara merupakan pilihan karena negara kita menghadapi kebobrokan ekonomi akibat krisis internasional. Dengan demokrasi sebagai instrumen, basis sosial negara kebangsaan menjadi luas, karena seluruh masyarakat terlibat dalam memecahkan masalah-masalah nasional.

Secara teoritis, perkembangan di atas seharusnya membuat sistem sosial politik menjadi lebih mantap dan sistem ekonomi menjadi lebih kuat serta lebih tahan dalam mempertahankan wawasan kebangsaan. Namun ternyata peningkatan ketahanan tersebut tidak terlihat secara aktual dalam kebersamaan kita di bidang ekonomi. Ini antara lain pula disebabkan oleh macetnya pembangunan kelas menengah masyarakat pengusaha Indonesia.

Kewirausahaan meskipun dalam sistem demokrasi sudah memunyai basis sosial yang lebih luas, tetapi kenyataannya tidak kunjung tumbuh secara signifikan. Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang kwa-pendidikannya masih demikian rendah, ternyata tidak mampu menjawab tantangan yang datang bertubi-tubi, sehingga proses pengambilan keputusan di berbagai strata kehidupan berlangsung terlalu lambat, bertele-tele, dan bahkan menjadi lebih sukar untuk memecahkan berbagai isu yang dihadapi.

Di lain pihak, masyarakat kalangan bawah - yang terpojok dan *nerimo ing pandum* serta yang tidak langsung bergiat memengaruhi proses lahirnya kebijakan publik dalam sistem demokrasi nasional, telah lari untuk mencari jalan keluar dari persoalan hidupnya masing-masing. Banyak di antara mereka menjadi pembantu rumah tangga yang bekerja layaknya hamba sahaya pada bangsa-bangsa lain, yang dulu berada di bawah duli bangsa kita, bangsa yang dipertuan di Asia Tenggara dalam era Sriwijaya dan Madjapahit.

Nasionalisme Indonesia menekankan pada kebersamaan. Oleh karenanya mementingkan aspek persatuan rakyat yang merupakan senjata paling ampuh dalam menghadapi segala macam rezim. Persatuan hanya akan kuat jika diwujudkan dalam suatu usaha yang terorganisir, bukan sekedar termobilisasi.

Operasi Intelstrat

Sebagaimana sifat administrasi negara pada umumnya di saat bangsa dan negara berada dalam keadaan bahaya, maka institusi-institusi intelijen pun memerlukan suatu kesatuan komando (*unity of command*) agar mudah digerakkan, meskipun ia berada tersebar di berbagai departemen yang mempunyai fungsi heterogen. Penunjukan Badan Intelijen Negara sebagai pemegang komando dan pengendali operasi intelijen yang hanya berdasarkan Keppres, tidak mungkin dapat mengoordinir secara efektif berbagai instansi yang berada di bawah undang-undang. Demikian pula undang-undang intelijen tidak dapat berada di bawah *criminal justice system* atau sistem peradilan kriminal, karena tugas intelijen yang lebih condong untuk mencegah

daripada mengusut sesuatu hal yang telah terjadi sama sekali bukan untuk *pro justicia*, melainkan untuk keperluan siasat.

Guidance atau kebijakan pola operasi intelijen strategis diberikan oleh Presiden atas dasar fungsi sosial dari negara untuk menjamin keselamatan rakyatnya, karena merupakan hak asasi mereka yang paling utama.

Kebijakan presiden disampaikan atas persetujuan sebuah panitia *ad hoc* bidang intelijen Komisi I DPR, karena menyangkut keamanan negara dan kerja sama dengan luar negeri yang berklasifikasi sangat rahasia. Isi dari kebijakan tersebut antara lain adalah :

1. Permasalahan : Dakwah yang menghasut dan terorisme terhadap yang membahayakan keselamatan rakyat Indonesia.
2. Sasaran strategis : AJAI
3. Susunan kekuatan : BIN dengan seluruh jajaran intel birokrasi negara.
4. Tugas pokok : Menghentikan kegiatan provokasi dan infiltrasi ideologis dari organisasi AJAI, organisasi-organisasi mantelnya, organisasi-organisasi lain yang sejenis, dan ajaran-ajaran politik theokrasi-nya yang berkedok syaria'h.
5. Rencana siasat : Penggembosan.
6. Rencana adm & log : Disusun dalam APBN
7. Instruksi-instruksi lain dari presiden.

Rencana siasat dijabarkan oleh Badan Intelijen dalam rencana strategi dan rencana operasi intelijen, yang akan berlaku sebagai perintah operasi intelstrat setelah mendapat persetujuan presiden.

Rencana strategi intel dan kontraintel menyangkut operasi penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Masyarakat bangsa Indonesia termasuk sebagai sasaran dalam operasi penggalangan, dan pengamanan, karena merupakan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan operasi intelstrat.

Dalam tataran strategi, langkah yang terpenting adalah mengelola secara terencana, cermat, terorganisir, teradministrasi, dan terkendali konflik antara dan antar AJAI, DI/NII dan organisasi lain yang anti-Pancasila. Dalam tataran taktis, kegiatan infiltrasi dan penetrasi dilaksanakan secara berkelanjutan ke dalam organisasi-organisasi tersebut. Terhadap para anggota mereka yang telah berada dipihak kita, dilakukan terus menerus usaha-usaha penggalangan dan kemudian pembinaan orang perorang. Itulah karenanya peranan *agent handlers* di sini sangat krusial.

Para mantan AJAI itu setelah keluar dari penjara hidupnya tergantung kepada aparat terkait, yang merupakan alat negara yang sangat terbatas kemampuan administrasi dan keuangannya. Di pihak lain, para tahanan terutama Abubakar Ba'asyir sendiri tidak ditempatkan di penjara tersendiri sehingga memudahkan kegiatan penggalangan, tetapi ditempatkan bersama-sama dengan tahanan-tahanan kriminal biasa lainnya. Karena itu ABB semakin besar dan luas pengaruhnya, justru setelah dia dan kawan-kawannya berada dalam tahanan negara Republik Indonesia. Keadaan itu menggambarkan belum dimengertinya pola operasi intelstrat dalam berbagai tatarannya oleh para penyelenggara negara kita, sehingga kambing hitam setiap kesalahan selalu ditimpakan kepada aparat intelijen sebagai alat negara. Eforia polemik di mass media atas suatu kegagalan yang cenderung menyalahkan alat negara dan bukan menyalahkan pemakainya, sama halnya dengan menyalahkan alat gergaji yang gagal memotong kayu dan bukan menyalahkan pemakainya.

Penggalangan terhadap masyarakat bangsa Indonesia diarahkan agar rakyat mengerti terhadap usaha-usaha pengamanan terhadap diri mereka. Dengan kesadaran berbangsa dan berwawasan kebangsaan, kekuatan massa yang termobilisasi dan terorganisasi diikutsertakan dalam usaha, pekerjaan, dan kegiatan negara menumpas terorisme di Indonesia. ***